

**KOMUNIKASI DALAM SISTEM
DEMOKRASI INDONESIA DAN
STRATEGI MENGHADAPI
ANCAMAN GLOBAL**

Editor:

**Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si
Angel Damayanti, M.Si.,M.Sc.,Ph.D**

UKI PRESS

2018

PROLOG

Buku “Komunikasi dalam Sistem Demokrasi Indonesia dan Strategi Menghadapi Ancaman Global Terkini” merupakan buku yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Kristen Indonesia (UKI) dalam rangka Dies Natalis Fisipol UKI ke-23. Buku ini berisi karya tulis ilmiah yang memuat konsep-konsep, kritik dan pendapat para akademisi dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi di Indonesia, kawasan Asia Tenggara dan internasional. Buku ini juga merupakan buah pemikiran para dosen Fisipol UKI, yang mencakup aspek politik, hukum, keamanan, ekonomi, pembangunan nasional, dan sosial budaya. Perubahan sosial dan politik yang dinamis baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional menjadi salah satu alasan bagi para dosen untuk menjadikannya sebagai bahan kajian.

Dalam konteks politik nasional, salah satu aspek yang dikaji dalam tulisan ini berkaitan dengan penerapan ideologi dan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Hal ini pada hakikatnya berawal dari adanya degradasi terhadap pemaknaan dan penghayatan, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga penulis pertama dalam buku ini, Osbin Samosir

mencatat perlu dilaksanakannya penyebarluasan makna Pancasila yang meliputi pengakuan terhadap eksistensi Tuhan, pengakuan terhadap perikemanusiaan dan HAM, integrasi nasional, pelaksanaan demokrasi tidak langsung yang didasarkan pada permusyawaratan, serta penerapan keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya penyebarluasan makna Pancasila yang tertuang dalam tulisannya, “Hikmat dan Kebijaksanaan Salah Satu Pokok Daya Hidup Demokrasi: Menggali Demokrasi dalam Sila Kerakyatan Indonesia,” diperlukan sebagai salah satu langkah penting dalam rangka menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Jika kita berkaca pada makna Pancasila tentu sudah dapat dilihat bahwa Pancasila tidak hanya bisa menjadi jiwa bangsa yang mengisi kerangka negara, tetapi juga menjadi dasar pendirian (perjanjian sosial) dan menjadi tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengakuan nilai-nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan yang merupakan nilai-nilai dominan yang hidup dalam sebuah kelompok masyarakat dewasa ini. Namun masalah-masalah sosial yang konvensional serta modern akibat perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi telah menjadi tantangan tersendiri bagi Pancasila baik dalam konteks

pemahaman maupun di tataran implementasi oleh kelompok masyarakat dan penyelenggara negara.

Untuk membangun kehidupan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dan mencerminkan budaya bangsa, diperlukan sebuah gaya komunikasi sehari-hari yang beretika, baik secara verbal maupun non-verbal. Penulis kedua dalam buku ini, Chontina Siahaan menyoroti hal itu dengan melihat pola komunikasi sosial kini yang seolah-olah melupakan tradisi warisan bangsa dengan adanya penghinaan, *character assassination*, penggunaan kata-kata kasar di media *online* maupun media sosial, penyebarluasan berita bohong (*hoax*), *black campaign*, hingga provokasi sosial bersifat tendensius yang dirangkum sebagai bentuk dari ujaran kebencian (*hate speech*). Untuk itu, menurut Chontina dalam tulisannya “Apa dan Mengapa Konsep Komunikasi Berwawasan Kebangsaan Itu?” bentuk komunikasi yang menjaga kesejukan dan ketenangan dalam menjaga persatuan kesatuan serta tidak membakar emosi perlu terus dibangun.

Selanjutnya, Donald Adrian dalam tulisannya yang berjudul, “Membangun Citra Politikus dalam Strategi Media Massa sebagai *Public Relations*,” melihat komunikasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk membangun citra politikus melalui media massa yang dilakukan sebagai

bagian dari upaya *public relations*. Komunikasi sebagai bentuk *public relations* bagi politikus di dalam negeri menjadi penting saat ini mengingat masyarakat umumnya memandang negatif para politikus dan mengaitkan mereka dengan perilaku yang tercela. Dalam situasi seperti itu, media massa bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memberitakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik dan membangun citra yang positif terhadap dirinya. Donal mencatat media massa menjadi sarana untuk publikasi karena ia mampu menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Beberapa aktor politik memanfaatkan media massa secara cerdas dan menjadikannya sebagai strategi yang tepat untuk meraih kepentingan politiknya.

Namun ketika komunikasi politik dilakukan dengan tujuan pencitraan sosial dalam meraih kepentingan politik, kebutuhan dan keadilan sosial justru terabaikan akibat ketiadaan atau kelemahan kebijakan publik. Hal inilah yang disorot oleh pemerintahan Jokowi-JK yang pada masa kampanye hingga awal pemerintahannya di tahun 2014 begitu gencar menyuarakan adanya *Revolusi Mental* sebagai poin utama dimulainya perubahan dengan menitikberatkan pada kesadaran sosial. Hal ini lahir dari keprihatinan terhadap berbagai situasi sosial yang dirasakan menjauh dari

cita-cita para *founding father*. Revolusi mental menjadi sebuah gerakan sosial yang dicita-citakan mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Terlebih dengan adanya tantangan bagi kesatuan Bangsa seperti merosotnya wibawa Negara, merebaknya intoleransi, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, yang menciptakan kesenjangan sosial bagi masyarakat.

Kesenjangan sosial ini menjadi pemicu polarisasi sosial yang pada akhirnya berujung pada potensi pecahnya konflik sosial hingga munculnya gerakan separatisme maupun gerakan yang berujung pada perlawanan sosial kepada pemerintah Indonesia. Kondisi ini diulas dalam tulisan Antie Solaiman yang berjudul, “Perlawanan Generasi Ketiga Papua Merdeka.” Tulisan ini mengaji bentuk perlawanan masyarakat Papua generasi ketiga yang lebih akademis namun juga militan dalam memperjuangkan keadilan bagi warga Papua. Hambatan-hambatan terhadap tercapainya keadilan sosial yang merupakan tujuan utama Pancasila tidak semata muncul atau disebabkan oleh masalah internal dalam negeri. Peleburan nilai-nilai universal maupun nilai sosial hingga kebijakan internasional akibat adanya globalisasi tidak bisa dipungkiri turut serta menjadi tantangan bagi terciptanya keadilan sosial.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Hassan Wirajuda dalam pernyataan Pers Departemen Luar Negeri, perumusan politik lokal dan luar negeri Indonesia sejatinya merupakan sebuah proses “intermestik” yang saling kait mengkait satu dengan lainnya. Kebijakan publik di tataran lokal, nasional dan internasional terhubung dan saling mempengaruhi dengan satu tujuan yaitu tercapainya kepentingan nasional bangsa. Salah satu kepentingan nasional tersebut adalah mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia sebagaimana cita-cita Pancasila. Hal ini yang seharusnya dapat diwujudkan dengan melakukan perbaikan dalam berbagai sektor seperti halnya ekonomi, politik dan keamanan Indonesia di tataran lokal, nasional, regional hingga Internasional.

Keadilan sosial dapat terwujud dengan adanya perbaikan sendi-sendi ekonomi Indonesia, dimana Indonesia dapat belajar pada praktik penyelenggaraan sistem ekonomi neo-liberal dari Negara-negara berkembang di Amerika Latin. Sejumlah negara di kawasan ini sebelumnya terjebak dalam ketergantungan ekonomi terhadap Negara barat, sebagaimana diulas oleh Imelda Sianipar dalam tulisannya, “Menyorot Faktor Dominan Pendorong Amerika Latin Mengadopsi Model Neoliberalisme.” Penekanan kekuatan ekspor yang dilakukan oleh Negara-Negara Amerika Latin

sebagaimana yang lebih dahulu dilakukan oleh Asia Timur menjadi kunci kemajuan ekonomi. Adanya peran pasar yang kuat dibandingkan dengan peran Negara dapat menjadi sebuah analisa perbandingan guna memperbaiki kelemahan-kelemahan sendi ekonomi bangsa yang makin tergerus dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas.

Di sisi lain, penguatan ketahanan dan kapasitas bangsa guna mewujudkan keadilan sosial dapat terwujud dengan adanya ketahanan dalam bidang keamanan. Tekanan globalisasi dan pergeseran kekuatan pasca perang dingin, nyatanya melarutkan batas-batas kedaulatan di antara Negara dan membuka peluang terjadinya kejahatan lintas batas Negara sebagai bentuk ancaman keamanan non-tradisional yang tidak hanya mengancam Negara, namun hingga pada individu (*Human Security*). Indonesia dengan wilayah yang luas dan terdiri dari ribuan pulau, sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional seperti halnya penyelundupan, perdagangan manusia, perdagangan senjata illegal, pencurian ikan illegal, pencemaran lingkungan, ancaman terorisme, perdagangan narkoba hingga pada kejahatan siber. Persoalan-persoalan keamanan lintas batas Negara tersebut, tentunya menjadi salah satu faktor penghambat terwujudnya keadilan sosial yang sangat bergantung pada stabilitas politik, ekonomi dan keamanan.

Untuk itu, perlu dirumuskan kebijakan dan strategi pemerintah dalam memberantas dan menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut, semisal 1) dalam penanggulangan penyalahgunaan penggunaan narkoba, pemerintah Indonesia dapat berkaca pada pola penanggulangan penyalahgunaan narkoba dari pemerintah Myanmar dengan pelaksanaan program pencegahan, melalui optimalisasi pendidikan dan sosialisasi, optimalisasi program pengobatan dan rehabilitasi, penegakan hukum dengan pendekatan “ramah HAM” dengan melibatkan secara lintas sektor dengan melibatkan aparat keamanan, hingga dengan menjalin kerjasama internasional dengan organisasi internasional terkait, 2) Sebagai upaya menciptakan ketahanan siber menyambut era perdagangan bebas dan *Asean Unity 2025*, Pemerintah Indonesia perlu membentuk badan siber nasional dan sandi Negara (BSSN) dalam upaya pemberantasan kejahatan siber hingga peningkatan kapasitas keamanan siber Indonesia; dan 3) pemerintah perlu membuat kebijakan kawasan yang sesuai dengan wawasan geopolitik Indonesia yang bertumpu pada aspek maritim dengan turut serta dalam pengawasan jalur laut internasional yang melewati Indonesia.

Berbagai kebijakan tersebut diulas dalam tulisan Sinta Herindrasti tentang “Perang Myanmar Melawan Narkoba, Menuju Kebijakan yang Lebih Manusiawi,” Indah Novitasari dalam “Implikasi Pendirian Badan Siber Nasional dan Sandi Negara (BSSN) terhadap Penguatan Kapasitas Keamanan Siber Indonesia Menyongsong Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN 2025,” dan tulisan Siti Merida yang berjudul, “Strategi Indonesia dalam Mengelola Wilayah Laut dengan Filipina di Laut Sulawesi Utara.” Keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam perumusan kebijakan dan strategi di tingkat regional dan Internasional tentunya dapat menambah “posisi tawar” guna mencapai kepentingan nasional yang tak lain adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, 5 Februari 2018

Tim Penyusun

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia-Nya, buku yang berjudul “Komunikasi dalam Sistem Demokrasi Indonesia dan Strategi Menghadapi Ancaman Globa Terkinil” ini dapat terbit. Buku ini merupakan hasil pemikiran dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang terangkum sebagai bukti nyata peranan para akademisi dalam menanggapi dinamika yang ada di negara Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Sesuai judulnya, buku ini mengulas tentang pentingnya komunikasi dalam sistem politik Indonesia yang lebih demokratis serta strategi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam mengatasi berbagai ancaman terkini. Oleh karena itu, kami berharap buku ini dapat memperkaya pengetahuan para mahasiswa dan pembaca lainnya mengenai perubahan sosial, politik dan ekonomi yang terjadi saat ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh penulis yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu merealisasikan terbitnya buku ini. Terima kasih juga kami haturkan kepada pihak Universitas Kristen Indonesia yang

telah mendukung penyusunan buku ini baik dari segi moral maupun material.

Kami menyadari bahwa buku ini belum sempurna baik secara konteks maupun konten, karenanya kami terbuka terhadap saran dan kritik demi perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami mengucapkan selamat menikmati dan semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2018

Dekan

Angel Damayanti, Ph.D

DAFTAR ISI

Prolog	
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiii
Komunikasi dalam Sistem Demokrasi di Indonesia Hikmat dan Kebijaksanaan Salah Satu Pokok Daya Hidup Demokrasi (Menggali Demokrasi dalam Sila Kerakyatan Indonesia)	
Oleh : Dr. Osbin Samosir, M.Si	1
Apa dan Bagaimana Konsep Komunikasi Berwawasan Kebangsaan itu ?	
Oleh : Dr. Chontina Siahaan, SH., M.Si	45
Membangun Citra Politikus dalam Strategi <i>Media Massa</i> Sebagai <i>Public Relations</i>	
Oleh : Donal Adrian, M.Ikom.....	85
Mencermati Gerakan Generasi Ketiga Papua	
Oleh : Dr. Yugiantie Solaiman, M.A	123
Menyorot Faktor Dominan Pendorong Amerika Latin Mengadopsi Model Neoliberalisme (Neloberalisme di Amerika Latin)	
Oleh Imelda Masni Juniaty Sianipar, M.A.	149

Perang Myanmar Melawan Narkoba Menuju Kebijakan yang Lebih Manusiawi?

Oleh : V. L Sinta Herindrasti, M.A..... 182

Implikasi Pendirian Badan Siber Nasional dan Sandi Negara (BSSN) Terhadap Penguatan Kapasitas Keamanan Siber Indonesia Menyongsong Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN 2025.

Oleh : Indah Novitasari, S.Sos., M.Si (Han).....211

Strategi Indonesia dalam Mengelola Wilayah Perbatasan Laut Indonesia Dengan Filipina di Laut Sulawesi Utara. (Studi Kasus : Pulau-Pulau Terluar)

Oleh Siti Merida Hutagalung, SH., MH.243

Etika komunikasi

APA DAN BAGAIMANA KONSEP KOMUNIKASI BERWAWASAN KEBANGSAAN ITU ?

Dr. Chontina Siahaan, SH., M.Si

Abstrak

Komunikasi berwawasan kebangsaan merupakan konsep komunikasi yang menjelaskan tentang penyampaian ide, pemikiran dan gagasan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa Indonesia yang ditandai oleh adanya sikap ramah, jujur, saling mendukung dan beretika. Individu yang tidak mengedepankan etika dan latar belakang budaya dalam berkomunikasi dapat berdampak negatif pada interaksi sosial yang dijalani dengan orang lain, misalnya sering menunjukkan perilaku saling menghina, saling pukul hingga pada upaya saling menjatuhkan nama baik. Perilaku tersebut tentunya tidak patut untuk dijadikan contoh. Berdasarkan masalah yang ada, maka perlu diterapkan komunikasi berwawasan kebangsaan

Kata Kunci: Komunikasi Berwawasan Kebangsaan, Etika Komunikasi, Sikap Nasionalisme

Latar Belakang

Amatlah penting memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang pentingnya menggunakan etika komunikasi sebagai cerminan budaya

yang dikenal ramah dan tamah. Jika hal tersebut bisa dilakukan dengan baik, maka secara tidak langsung masyarakat tersebut telah menerapkan komunikasi berwawasan kebangsaan.

Indonesia adalah negara kepulauan memiliki wilayah yang luas, terbentang dari Aceh sampai ke Papua. Ada 17.504 pulau yang tersebar di seluruh kedaulatan Republik Indonesia, yang terdiri atas 8.651 pulau yang bernama dan 8.853 pulau yang belum bernama (Situmorang, 2006). Di samping memiliki wilayah yang luas dengan beragam kekayaan alam dan keanekaragaman hayati dan nabati, Indonesia dikenal juga dengan keberagaman budayanya.

Di Indonesia terdapat puluhan etnis yang memiliki budaya masing-masing. Misalnya, di Pulau Sumatra: Aceh, Batak, Minang, Melayu (Deli, Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, dan sebagainya), Lampung; di Pulau Jawa: Sunda, Badui (masyarakat tradisional yang mengisolasi diri dari dunia luar di Provinsi Banten), Jawa, dan Madura; Bali; Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur: Sasak, Mangarai, Sumbawa, Flores, dan sebagainya; Kalimantan: Dayak, Melayu, Banjar, dsb.; Sulawesi: Bugis, Makassar, Toraja, Gorontalo, Minahasa, Manado, dsb.; Maluku:

Ambon, Ternate, dsb.; Papua: Dani, Asmat, dsb.) (Lihat Bangun, 2002:94—116; Bagus, 2002:286—306; Dananjaja, 2002: 118—142; Subyakto, 202: 173—189; Koentjaraningrat, 2002: 190—204; Sjamsuddin, 2002: 229—247; Junus, 202:248—265; Mattulada, 2002:266—285; Bagus, 2002:286—306; Kodiran, 2002:329—352).

Banyaknya pulau yang tersebar di Indonesia tentunya berdampak pada keberagaman budaya pada masing-masing kelompok masyarakat. Meskipun demikian, keberagaman tersebut tidak serta merta membuat bangsa Indonesia menjadi berbeda antara suku yang satu dengan suku yang lain perihal perilaku yang ditunjukkan. Karena secara umum, masyarakat Indonesia memiliki karakteristik budaya yang ramah dan tamah. Pola komunikasi mereka menunjukkan pola komunikasi penuh kesopanan dan kesantunan.

Kemampuan berkomunikasi dengan baik yang mampu memperlihatkan kesopanan kepada orang lain tentunya tidak akan terlepas dari adanya peran budaya. Perilaku positif tersebut menunjukkan bahwa individu tersebut telah memahami bagaimana cara menggunakan komunikasi berwawasan kebangsaan.

Akan tetapi, jika kita tidak menjaga dan mempertahankan komunikasi berwawasan kebangsaan yang menekankan pada etika komunikasi yang berasal dari budaya masyarakat Indonesia, maka dapat mengakibatkan dampak negatif dalam interaksi sosial.

Selain itu, proses modernisasi yang masuk dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia juga telah menjadi penyebab terbesar memudarnya perilaku kesopanan, khususnya dalam berkomunikasi.

Indonesia melangsungkan proses modernisasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional secara bertahap dalam berbagai bidang kehidupan. Perwujudan modernisasi sangat terlihat pada pola kebijakan pembangunan yang menempatkan sektor industri sebagai ujung tombak perekonomian negara. Pola pembangunan yang menekankan pada sektor industri ini selalu mengarah pada pola pembangunan yang melihat sebuah kemajuan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi tanpa melihat sisi-sisi yang lainnya, misalnya dampak perubahan terhadap kesehatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang dengan pesat, akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat (www.jogjakita.or.id/appetite/sos1.php)

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, dan sektor kehidupan sosial budaya lainnya, merupakan dampak dari upaya bangsa Indonesia dalam melaksanakan modernisasi nasional, sebelum pada akhirnya memasuki percaturan globalisasi. Salah satu dampak yang muncul ke permukaan adalah adanya kegoncangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Suara Merdeka, 14 September 2002).

Sioui (1993) mencatat bahwa nilai-nilai tradisional masyarakat memiliki jaminan ketentraman (*equanimity*) secara almah, karena lebih mengutamakan rasa berbagi dan bekerjasama daripada kompetisi. Nilai tradisional berupa kebersamaan dan spiritual yang harmoni ini secara tajam berlawanan dengan nilai materialisme yang menampilkan wujud agresif dan ketamakan ala masyarakat *euroamerican*.

Dengan adanya perubahan ini, nilai tradisional yang positif pada bangsa Indonesia mulai luntur. Nilai-nilai positif bangsa, seperti nilai sopan santun, tatakrama, disiplin, budi pekerti yang mendasari perilaku dan sikap manusia Indonesia mulai meredup. Nilai-nilai ini sebenarnya sudah

banyak yang mengalami perubahan sejalan dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman.

Di sisi lain bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi dan politik, konflik sosial mulai bermunculan pada berbagai daerah. Kita mengenal Bangsa Indonesia sebelumnya sebagai bangsa yang ramah, yang memiliki tata krama yang sangat tinggi. Bangsa ini kini seolah berubah menjadi bangsa yang brutal dan bengis.

Beberapa contoh konkrit mudarnya tata karma dalam berinteraksi sosial, khususnya ketika berkomunikasi, yaitu adanya perilaku masyarakat sebagai pengguna akun media sosial seperti *facebook*, yang banyak menggunakan kalimat-kalimat negatif. Kalimat-kalimat itu misalnya, kalimat yang saling membuli, saling mengancam dan menunjukkan kehebatan diri baik dari segi stratifikasi sosial mau pun talenta nya masing-masing. Bahkan, pada tingkat pejabat banyak juga yang tidak bisa menggunakan etika komunikasi. Mereka saling menghujat melalui media massa, bersikap tidak jujur. Bentuk yang paling parah pun ada, yaitu berkelahi ketika rapat berlangsung. Dari dunia pendidikan pun, seperti pada level mahasiswa, banyak juga yang

menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas dalam melakukan interaksi sosial.

Masalah-masalah yang terjadi di atas tentunya memberikan gambaran bahwa sebagai masyarakat Indonesia, mereka belum memiliki wawasan kebangsaan yang baik, khususnya dari sudut pandang komunikasi. Berikut adalah beberapa contoh perilaku negatif masyarakat Indonesia yang tidak menggunakan komunikasi berwawasan kebangsaan

Aksi menggemparkan mahasiswa UGM hina Yogyakarta:

Merdeka.com - Florence Sihombing menumpahkan kekesalannya di jejaring sosial Path karena kesal antre BBM di SPBU tak dilayani. Mahasiswi S2 Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menghina Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal Jogja," tulis Florence.

Ternyata status kekesalan Florence di Path yang sudah dicapture itu menyebar ke media sosial. Kontan saja, Florence menjadi sasaran kemarahan warga khususnya masyarakat Yogyakarta. (<https://www.merdeka.com/peristiwa/aksi-menggemparkan-mahasiswa-ugm-hina-yogyakarta.html>)

Berita tentang aksi mahasiswa UGM hina Yogyakarta, tentunya menunjukkan adanya aksi yang tidak menerapkan komunikasi berwawasan kebangsaan. Dalam penyampaian pesannya, mahasiswa tersebut menggunakan kalimat-kalimat negatif yaitu "*Jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal Jogja,*" tulis Florence. Pernyataan yang disampaikan oleh Florence tersebut merupakan bentuk komunikasi verbal yang tidak menunjukkan kesopanan dan tidak memberikan penghargaan atau menghormati budaya masyarakat Yogyakarta.

Selanjutnya, terdapat juga berita yang berasal dari kalangan pejabat tentang perilaku yang buruk yaitu melakukan perkelahian secara fisik. Berikut ini adalah berita yang terkait dengan perkelahian anggota DPR.

Ini Kronologi Perkelahian Anggota DPR Saat

Rapat dengan Menteri ESDM:

JAKARTA, KOMPAS.com — Perkelahian terjadi di antara dua anggota DPR, yakni Mulyadi (Fraksi Demokrat) dengan Mustofa Assegaff (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan). Keributan itu terjadi saat rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2015) malam.

Mulyadi pun menceritakan kronologi kejadian tersebut kepada Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukriyanto. Menurut Didik, Mulyadi yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII dan pimpinan sidang saat itu mengingatkan Mustofa untuk tidak menggunakan hak bicara terlalu lama. Namun, Mustofa justru tidak memperhatikan batas waktu yang sudah diberikan itu.

"Kemudian diingatkan oleh Pak Mul, lalu terjadi debat," kata Didik saat dihubungi.

Setelah itu, lanjut Didik, Mulyadi pergi ke kamar mandi yang ada di belakang ruang rapat. Mustofa mengikuti langkah Mulyadi. Di sana, perdebatan terjadi lagi. Mulyadi kembali mengingatkan bahwa Mustofa telah melanggar tata tertib karena bicara lebih dari waktu yang ditentukan.

"Tiba-tiba bogem melayang. Pak Mul tidak siap. Ini bukan *berantem*. Ini sudah termasuk penganiayaan," ucapnya.

Fraksi Demokrat, kata Didik, mendukung Mulyadi untuk mengambil langkah hukum, baik ke Kepolisian maupun ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Seperti diberitakan, dua anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat terlibat perkelahian seusaai rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Hingga saat ini, penyebab kejadian belum diketahui secara pasti. Salah seorang saksi mengatakan, keributan itu hanya berlangsung singkat. Perkelahian berlangsung di bagian belakang ruang rapat. Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, sudah meminta maaf atas ulah anggota Fraksi PPP, Mustofa Assegaf, yang berkelahi dengan anggota Fraksi Demokrat, Mulyadi.

Arsul mengatakan, fraksi menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan jika memang ada sanksi yang diberikan atas hal ini. <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/08/21130081/Ini.Kronologi.Perkelahian.Anggota.DPR.Saat.Rapat.dengan.Menteri.ESDM> (Diakses 15 Oktober 2017, pukul 11.32 WITA)

Berita tentang perkelahian anggota DPR saat rapat dengan menteri ESDM tentunya bukan merupakan sesuatu yang baik. Dalam sudut pandang komunikasi, perkelahian tersebut merupakan perilaku yang menggunakan kekerasan non verbal seperti dalam tindakan yang dijelaskan dalam kalimat: *"Tiba-tiba bogem melayang. Pak Mul tidak siap. Ini bukan berantem. Ini sudah termasuk penganiayaan,"* ucapnya. Tindakan negatif antar sesama pejabat ini menunjukkan keramahan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sedikit demi sedikit akan hilang.

Masalah yang terkait dengan ketidaksopanan dalam berinteraksi yang menunjukkan tidak menerapkan komunikasi berwawasan kebangsaan, pada dasarnya banyak terjadi. Kita dapat menemukan permasalahan tersebut dalam komunikasi antara anak dan orangtua, antara siswa dan guru, antara atasan dan bawahan, atau bahkan sesama antara teman sebaya yang lebih suka memanggil temannya

dengan sebutan nama hewan. Anak-anak, remaja dan bahkan pemuda dewasa pada beberapa kota besar di Indonesia yang sering memanggil temannya dengan sebutan “*Anjay*” (Anjing).

Memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang pentingnya menggunakan etika komunikasi sebagai cerminan budaya yang ramah dan tamah merupakan tujuan dari penelitian ini, agar setiap orang dapat menjalankan komunikasi berwawasan kebangsaan dengan baik.

Definisi Komunikasi

Pada hakekatnya, komunikasi memiliki makna yang dalam. Sederhana apapun bentuk komunikasi yang terjadi, terdapat berbagai hal yang kompleks di dalamnya. Terlebih lagi bila kita mengaitkannya dengan isi pesan, media dan tujuannya sebagaimana definisi komunikasi menurut Effendy (2007:60) yaitu :

Proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai paduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, imbauan dan sebagainya yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik langsung, secara tatap muka

maupun tidak langsung melalui media, dengan tujuan mengubah sikap, pandangan atau perilaku”.

Selain itu, pengertian komunikasi juga disampaikan oleh (Ruben & Stewart, 1998) (dalam Liliweri, 2011:35) menyatakan bahwa :

Komunikasi merupakan sesuatu yang sangat efisien bagi individu, relasi, kelompok, organisasi dan masyarakat, dia merupakan garis yang menghubungkan manusia dengan dunia, bagaimana manusia membuat kesan tentang dan kepada dunia, komunikasi sebagai sarana manusia untuk mengekspresikan diri dan mempengaruhi orang lain. Karena itu, jika manusia tidak berkomunikasi maka dia tidak dapat menciptakan dan memelihara relasi dengan sesama dalam kelompok, organisasi dan masyarakat; komunikasi memungkinkan manusia mengkoordinasikan semua kebutuhannya dengan dan bersama orang lain.

1. Komunikasi Yang Efektif

Komunikasi yang efektif mengandung pengiriman dan penerimaan informasi yang paling cermat, pengertian pesan yang mendalam oleh kedua belah pihak dan pengambilan tindakan yang tepat terhadap penyelesaian pertukaran informasi, Moekijat, (1993:145).

Komunikasi yang efektif menurut Tubbs dan Moss yang dikutip oleh Rakhmat (2005:13) dalam buku Psikologi Komunikasi, paling tidak menimbulkan 5 hal yaitu:

- a. Pengertian; yaitu penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti yang dimaksud oleh komunikator.
- b. Kesenangan; komunikasi ini lazim disebut sebagai komunikasi fatis (*phatic communication*), dimaksudkan untuk menimbulkan kesenangan. Komunikasi ini yang menjadikan hubungan kita hangat, akrab dan menyenangkan.
- c. Mempengaruhi sikap; paling sering kita melakukan komunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Dalam bentuk mempengaruhi pendapat, sikap dan tindakan orang lain dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri.
- d. Hubungan sosial yang baik; komunikasi juga ditujukan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bertahan hidup sendiri. Kita ingin berhubungan dengan orang lain secara positif.
- e. Tindakan; efektifitas komunikasi biasanya diukur dari tindakan nyata yang dilakukan komunikan.

2. Langkah-Langkah Mengatasi Hambatan Komunikasi

Adapun beberapa upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan komunikasi menurut Triwidodo T. (2004: 113-120) antara lain :

- a. Mengembangkan Wawasan : Sebagai pusat informasi (komunikator) hendaknya mempunyai wawasan yang luas agar lancar dalam memberikan informasi yang dibutuhkan
- b. Menggunakan Bahasa Tubuh yang tepat akan memperjelas pembicaraan dan menambah daya tarik pembicaraan serta tampak lebih berwibawa. Sebaliknya bahasa tubuh yang berlebihan akan mencerminkan emosi yang sedang dialami sehingga tidak menarik simpati lawan bicara
- c. Menjaga Kontak Mata dan Jarak Bicara yang tepat mencerminkan seorang yang percaya diri dan mampu menyesuaikan diri, sebaliknya seseorang yang tidak melihat lawan bicara dapat diartikan orang yang meremehkan atau membencinya. Oleh karena itu dalam berkomunikasi perlu menjaga kontak mata dan menjaga jarak dalam berbicara
- d. Memiliki Rasa Humor: dapat dilakukan apabila melihat atau mendengar aspek-aspek yang lucu dan menyenangkan dalam hidup
- e. Memiliki Rasa Empati : suasana percakapan yang menyenangkan dalam berbicara

dengan orang yang mau mengerti, memahami dan memperhatikan lawan bicara. Salah satu cara menumbuhkan rasa empati adalah mau menjadi pendengar yang baik.

Komunikasi Berwawasan Kebangsaan

Salah satu pedoman wawasan nasional bangsa Indonesia yang berpijak pada wujud wilayah nusantara disebut Wawasan Kebangsaan. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sentosa. Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitar (regional atau internasional).

Menurut Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN “Wawasan Kebangsaan merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional”. Pendapat lainnya adalah bahwa “Wawasan kebangsaan merupakan

sudut pandang, cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami jati diri suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup dalam lingkungan internal dan eksternal”.

Menurut Hatta (1992) memang sulit memperoleh kriteria yang tepat apa yang menentukan bangsa. Bangsa bukanlah didasarkan pada kesamaan asal, persamaan bahasa, dan persamaan agama. Menurut Hatta “bangsa ditentukan oleh sebuah keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsyafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan yang bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak.”

Pengertian tentang rasa dan wawasan kebangsaan tersebut di atas sebenarnya merupakan pandangan generik yang menjelaskan bahwa rasa dan wawasan lahir dengan sendirinya di tengah ruang dan waktu seseorang dilahirkan. Tidak salah bila pandangan generik itu mengemukakan

pentingnya menumbuhkan semangat kejuangan, rasa kebanggaan atas bumi dan tanah air tempat seseorang dilahirkan, dan sebagainya.

Menurut Benedict Anderson (1991) wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik (*socially and politically constructed*).

Pidato Bung Karno atau perhatian Hatta mengenai wawasan kebangsaan adalah bagian penting dari konstruksi elit politik terhadap bangunan citra (*image*) bangsa Indonesia. Apa pun perbedaan pandangan elit tersebut, persepsi itu telah membentuk kerangka berpikir masyarakat tentang wawasan kebangsaan.

Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, maju, dan mandiri akan berhasil dengan persatuan bangsa yang kokoh. “Cinta akan Tanah Air dan Bangsa” menegaskan nilai sosial dasar. Dengan ini wawasan kebangsaan menempatkan penghargaan tinggi akan kebersamaan yang luas, yang melindungi setiap warga, yang menyediakan tempat untuk perkembangan pribadi bagi setiap

warga, yang sekaligus mengungkapkan hormat terhadap solidaritas manusia. Solidaritas itu mengakui hak dan kewajiban azasi sesamanya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi berwawasan kebangsaan adalah penyampaian ide, pemikiran dan gagasan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa Indonesia yang ditandai dengan adanya sikap ramah, jujur, saling mendukung dan beretika.

Etika Komunikasi

1. Konsep Etika Komunikasi

Etika Komunikasi akan mencoba mencari standar etika apa yang digunakan oleh komunikator dan komunikan dalam menilai di antara teknik, isi dan tujuan komunikasi. Dalam buku etika komunikasi seperti yang dikutip oleh Karimah dan Uud (2010 : 74) memuat beberapa pertanyaan dasar untuk menjadi alat ukur dalam membuat penilaian etika komunikasi yang lebih sistematis dan memiliki dasar yang kuat, yaitu :

- a. Mampukah saya menjelaskan dengan tepat apa kriteria, standard atau perspektif etika yang diterapkan pada saya?
- b. Kepada siapakah tanggung jawab etis harus diberikan?
- c. Mampukah keetisan komunikasi ini dibenarkan sebagai refleksi yang melekat pada pribadi komunikator?
- d. Bagaimanakah perasaan saya tentang diri sendiri berdasarkan pilihan etika ini?
- e. Jika diminta secara terbuka untuk membenarkan etika komunikasi saya, sejauh mana saya melakukannya?
- f. Apakah kasus serupa yang sebelumnya dapat saya gunakan untuk mendapatkan pedoman etika?
- g. Jika satu-satunya jalan menuju keberhasilan mencapai tujuan komunikator mensyaratkan digunakan beberapa teknik komunikasi yang tidak etis, adalah pilihan realistik (paling tidak untuk sementara) untuk menahan diri dari komunikasi atau untuk tidak berkomunikasi sama sekali.
- h. Apakah preseden atau kasus yang serupa sebelumnya dapat saya gunakan untuk mendapatkan pedoman etika?
- i. Berapa jauhkah alternatif dikembangkan sebelum menentukan pilihan tertentu?

Nilsen (dalam Johannesen, 1996), mengatakan bahwa untuk mencapai etika komunikasi, perlu diperhatikan sifat-sifat berikut:

- a. Penghormatan terhadap seseorang sebagai person tanpa memandang umur, status atau hubungannya dengan si pembicara
- b. Penghormatan terhadap ide, perasaan, maksud dan integritas orang lain
- c. Sikap suka memperbolehkan, keobjektifan, dan keterbukaan pikiran yang mendorong kebebasan berekspresi
- d. Penghormatan terhadap bukti dan pertimbangan yang rasional terhadap berbagai alternative
- e. Terlebih dahulu mendengarkan dengan cermat dan hati-hati sebelum menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan.

Komunikasi sering kali menjadi masalah karena tidak nyambung dalam penyampaian. Tidak nyambung ini bisa berakibat kepada *misscommunication*/salah pengertian antar *sender* dan *receiver*. Hal ini merupakan juga hasil dari bagaimana tata krama, sopan santun, etika dalam berkomunikasi. Mungkin setiap kata sudah terpikirkan dan diucapkan dengan jelas, namun pasti ada saja yang menjadi hambatan.

2. Peran Etika Komunikasi

Menurut Susanto, AB (1997: 27-32) Komunikasi efektif harus fokus menjalankan 3 komponen yaitu : a) komunikasi menyampaikan artinya pada saat seseorang diajak berkomunikasi sebaiknya lawan bicara

memperhatikan dengan baik sehingga ada integritas pribadi keduanya, b) komunikasi menjual artinya seseorang yang diajak bicara mampu menerima pesan/informasi yang disampaikan, c) Komunikasi mengubah ketrampilan seseorang dalam menyampaikan informasi yang menghendaki terjadinya perubahan sikap dan perilaku orang lain.

Budaya

1. Pengertian Budaya

Budaya atau Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “*budhayah*” yang merupakan bentuk jamak dari “*budhi*” yang berarti ‘budi’ atau ‘akal’. Sehingga Koentjaraningrat (1990: 181) mendefinisikan budaya sebagai daya dari budi berupa cipta, karsa dan rasa. Sedangkan budi diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal manusia yang merupakan pancaran dari budi dan daya terhadap seluruh apa yang dipikir, dirasa, direnungkan, yang kemudian diamankan dalam bentuk suatu kekuatan yang menghasilkan kehidupan. Dalam Kamus, budaya adalah pikiran, akal budi, hasil. Sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia (seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat).

Mempelajari konsep dari ‘Kebudayaan’ adalah tidak mudah karena banyak sekali batasan konsep dari berbagai bahasa, sejarah, sumber bacaan atau literatur baik yang berwujud ataupun yang abstrak dari sekelompok orang atau masyarakat. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa, yang berarti mengolah atau yang mengerjakan sehingga memengaruhi tingkat pengetahuan, sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, dalam kehidupan sehari-hari, sifatnya abstrak.

Sedangkan perwujudan lain dari kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

2. Identitas Etnik

Identitas dijadikan tanda pengenal, memiliki makna pada budaya yang diciptakan oleh masyarakat tersebut. Sebuah identitas sebagai karakter khusus yang melekat pada setiap kebudayaan, sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Kebudayaan yang diangkat menjadi sebuah identitas suatu budaya tidak

diciptakan begitu saja, namun memerlukan waktu yang cukup lama untuk diketahui, diakui, ditaati dan diimplementasikan dalam lingkungan hidup. Identitas adalah satu proses restrukturasi (pembangunan) segala identifikasi dan gambaran diri terdahulu, dimana seluruh identitas fragmenter yang dahulu (pun yang negatif) diolah dalam perspektif suatu masa depan yang diantisipasi (Erikson, 1989: 186).

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari kelompok etnis yang beragam. Ahli sosiologi merujuk etnik sebagai satu kelompok manusia yang mempunyai ikatan kebudayaan yang banyak persamaan seperti persamaan agama, ras, maupun asal usulnya. Kumpulan etnik yang sama berkongsi adat, bahasa, pakaian tradisional, makanan dan mempunyai hubungan sosial sesama mereka. Perkongsian nilai telah menghasilkan identitas etnik tertentu yang secara tidak langsung membahagiakan masyarakat dengan kumpulan etnik yang berbeda.

Etnik juga didefinisikan sebagai:

“An ethnic group is defined as a collectivity within a larger society having real or putative common ancestry, memories of a shared historical past, and

cultural focus on one or more symbolic elements defined as the epitome of their peoplehood. Examples of such symbolic elements are: kinship patterns, physical contiguity, religious affiliation, language or dialect forms, tribal affiliation, nationality, or any combination of these.” (Schermerhorn, R. 1996:17)

Hubungan antara satu kelompok etnis dengan kelompok etnis lainnya beragam, ada yang cukup harmonis dan ada yang sering diwarnai oleh konflik. Menurut Abdullah (2001), pola hubungan antar etnis itu ditentukan oleh tiga corak ruang yang menentukan karakter dari hubungan antar etnis itu sendiri. *Pertama*, berbagai etnis Indonesia tersebar dalam wilayahnya sendiri-sendiri dengan batas-batas fisik (*physical boundary*) yang jelas menyebabkan pendefinisian diri lebih terikat pada daerah asal dan memiliki klaim terhadap asal usulnya sebagai pewaris tradisi dan wilayah. *Kedua*, berbagai etnis di Indonesia tersebar di berbagai tempat dengan batas-batas fisik yang semakin tidak jelas dan memiliki sejarah masa lalu yang berbeda dengan etnis-etnis yang terlibat dalam interaksi sosial sehari-hari. *Ketiga*, munculnya wilayah baru (seperti *sub urban*) yang dibuka pada berbagai tempat yang menyebabkan pertemuan antar etnis dalam suatu wilayah yang telah mengalami redefinisi atas status tanah dan wilayah yang bebas dari pemilikan sua-

tu etnis. Dalam situasi semacam ini setiap etnis ditempatkan dalam posisi yang relatif *egaliter* (Abdullah, 2001: 38).

Identitas etnik adalah pemahaman individu akan siapa dirinya, adanya ikatan antara individu dan kelompok yang bersifat emosional, kepercayaan saat berada dalam kelompok, dan komitmen yang kuat terhadap kelompok serta bersama-sama melakukan adat-istiadat atau kebiasaan yang sama. Cornell dan Hartmann (1998, h.12). Identitas etnik menjelaskan bagaimana manusia menggunakan dan mengatur ide-ide tentang siapa mereka, mengevaluasi pengalaman pribadi dan perilakunya guna memahami dunia di sekitarnya.

Isajiw (1999) menjelaskan bahwa identitas etnik meliputi dua aspek yaitu: Aspek internal identitas etnik merujuk pada citra (*images*), ide (*ideas*), sikap (*attitudes*), dan perasaan (*feeling*). Aspek internal ini terbagi lagi dalam empat dimensi yaitu *affective* (afektif), *Fiducial* (kepercayaan), *cognitive* (kognitif), *moral* (moral). Aspek eksternal merujuk pada perilaku yang dapat diamati (*observable behaviours*) yang meliputi: logat (dialek) bahasa; praktek tradisi etnik; keikutsertaan dalam jaringan

kerja etnik tersebut seperti keluarga dan persahabatan; dan terlibat dalam institusi.

Konsekuensi dari identitas etnik adalah sikap *ethnosentrisme*. Etnosentrisme adalah semacam paham yang menganggap kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan orang lain atau kelompok lain (luar). Liliweri (2005, h.236). Konflik etnik yang melibatkan kekerasan harus dipandang dari kacamata yang lebih luas. Konflik etnik yang diawali oleh prasangka, stereotipe, jarak sosial, atau diskriminasi harus dimengerti bagaimana etnisitas berperan. Beberapa ahli yang menjelaskan mengenai hubungan antara identitas etnik dengan prasangka (dalam Liliweri, 2005, h.203) adalah Zastrow mengemukakan bahwa prasangka salah satunya disebabkan oleh adanya proyeksi atau upaya mempertahankan ciri kelompok etnik/ras secara berlebihan.

Budaya Bangsa Indonesia

Indonesia sebagai bangsa yang sangat beraneka ragam (*plural*) merupakan suatu keniscayaan, yang tidak terelakkan. Untuk itu, kita mesti memperhitungkan seluruh unsur keanekaragaman itu dalam upaya pembangunan bangsa (*nationbuilding*) sesuai dengan kondisi

perkembangan zaman. Secara realistik, keanekaragaman bangsa kita itu dapat dilihat dalam hal suku bangsa, agama, ras, golongan, bahasa, dan juga budaya.

Budaya di Indonesia sangat beragam dan tentunya memiliki karakteristik masing-masing di antaranya budaya Sulawesi, Kalimantan, Irian Jaya, Sumatera, Bali, Ambon, Lombok dan lain sebagainya. Namun, walaupun adanya keberagaman budaya tersebut, secara umum bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang ramah, karena dalam aplikasi budayanya selalu menunjukkan kesopanan dalam komunikasinya. Artinya bahwa melalui komunikasi orang akan paham apa yang kita miliki, dan apa yang sering kita lakukan terkait dengan kebiasaan-kebiasaan terkait dengan budaya yang kita miliki.

Berdasarkan konsep yang ada bahwa komunikasi dan kebudayaan memang tak dapat dipisahkan. Kata Edward T. Hall, komunikasi adalah kebudayaan dan kebudayaan adalah komunikasi. Kebudayaan itu hanya dimiliki oleh manusia maka komunikasi itu milik manusia dan dijalankan di antara manusia. Smith, dalam Rumondor (1995: 284) menerangkan hubungan yang tak terpisahkan antara komunikasi dan kebudayaan yaitu: *Pertama*, kebudayaan

merupakan suatu kode atau kumpulan peraturan yang dipelajari dan dimiliki bersama. *Kedua*, untuk mempelajari dan memiliki bersama diperlukan komunikasi, sedangkan komunikasi memerlukan kode-kode dan lambang-lambang yang harus dipelajari dan dimiliki bersama.

Salah satu bentuk budaya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup (Kemdikbud, 2016). Sedangkan menurut Akhmar dan Syarifudin (2007), kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif.

Secara substansial, kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam tatanan masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya yang menjadi pedoman dalam bertingkah-laku sehari-hari suatu masyarakat. Kearifan lokal merupakan “asset spiritual” atau kebijakan hidup yang mengajarkan masyarakat bagaimana harus bersikap. Oleh karenanya meskipun kearifan lokal merupakan hasil produk budaya masa lalu namun patut secara terus menerus menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia .

Kearifan lokal bersifat lokal artinya kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena tantangan alam dan kebutuhan hidup yang berbeda-beda antar wilayah dan antar suku. Namun demikian ada kearifan lokal yang tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya tertentu melainkan dapat pula bersifat lintas budaya sehingga membentuk kearifan lokal yang bersifat nasional. Satu contoh adalah kearifan lokal yang mengajarkan untuk gotong royong yang dapat ditemui hampir di semua budaya/suku di seluruh wilayah Indonesia.

Di Indonesia, kearifan lokal merupakan filosofi dan pandangan hidup yang diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam tata nilai sosial ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, dan sebagainya. Kearifan lokal biasanya diajarkan secara turun temurun dari generasi ke generasi yang diwujudkan dalam bentuk benda (*tangible*) dan tak benda (*intangible*), misalnya bahasa, sastra, kesenian, upacara, adat istiadat dan sebagainya. Selain itu kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama yang bersifat menjaga dan melestarikan alam. Sebagai contoh di Papua terdapat kepercayaan *te aro neweak lako* (alam adalah aku),

Gunung Erstberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Dengan hal ini maka pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara hati-hati.

Menghayati, mempraktekkan, dan mewariskan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam sistem sosial masyarakat ini sangatlah penting dalam membentuk dan menuntun pola perilaku masyarakat dari generasi ke generasi. Dapat dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Pembangunan yang tidak didasarkan pada kebijakan hidup dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan bangsa (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan “PDSPK” 2016: 3)

Bangsa Indonesia memiliki banyak nilai-nilai kearifan lokal yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kearifan lokal mengajarkan untuk ramah tamah, gotong royong, sopan, rela berkorban, memiliki etos kerja yang baik, saling menghormati, dan toleransi. Namun nampaknya kearifan lokal yang ada tersebut seolah kurang memiliki peran dan mulai pudar kekuatannya sebagai pedoman kebijakan hidup bangsa Indonesia. Oleh karenanya perlu

dilakukan upaya agar kearifan lokal tetap dapat hidup dan berkembang serta mengikuti arus perkembangan global (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan “PDSPK” 2016: 5)

Sikap Nasionalisme

Secara etimologis nasionalisme berasal dari bahasa latin *nation* yang berarti bangsa yang dipersatukan. Menurut Sunarso dkk (2008:36) nasionalisme adalah sikap nasional untuk mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa dan sekaligus menghormati bangsa lain. Selanjutnya Hertz (1996: 47) berpendapat bahwa nasionalisme merupakan ideologi negara dan satu bentuk tingkah laku dari suatu bangsa.

Nasionalisme sebagai ideologi yang dibentuk berdasarkan gagasan bangsa memberi fondasi yang kokoh bagi negara. Sebagai ideologi, nasionalisme dapat memainkan tiga fungsi, yaitu mengikat semua kelas warga bangsa, menyatukan mentalitas warga bangsa, dan membangun atau memperkuat pengaruh warga bangsa terhadap kebijakan yang diambil oleh negara. Nasionalisme merupakan salah satu alat perekat kohesi sosial untuk

mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. Semua negara dan bangsa membutuhkan nasionalisme sebagai faktor integratif.

Boyd Shafer (1955: 6) mengatakan bahwa nasionalisme itu multi makna, hal tersebut bergantung pada kondisi objektif dan subjektif dari setiap bangsa. Oleh sebab itu nasionalisme dapat bermakna sebagai berikut:

1. Nasionalisme adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa atau budaya yang sama, maka dalam hal ini nasionalisme sama dengan patriotisme.
2. Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan dan prestise bangsa.
3. Nasionalisme adalah suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial yang kabur, kadang-kadang bahkan adikodrati yang disebut sebagai bangsa atau Volk yang kesatuannya lebih unggul daripada bagian-bagiannya.
4. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri.

Hasil dan Analisis

Komunikasi berwawasan kebangsaan merupakan bentuk penyampaian pesan yang berdasarkan pada etika dan budaya bangsa Indonesia. Komunikasi ini harus diterapkan

dengan tujuan untuk membina hubungan sosial antar sesama masyarakat.

Penerapan komunikasi berwawasan kebangsaan yang sangat jelas dan pernah disaksikan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu komunikasi yang terjalin antara Joko Widodo dan Prabowo. Seperti yang kita ketahui bahwa keduanya pernah menjadi rival dalam ajang pemilihan presiden Republik Indonesia ditahun 2014 yang kemudian memenangkan Joko Widodo sebagai presiden. Namun untuk tetap menjalin hubungan yang harmonis, kedua rival tersebut tetap saling mendukung dan saling menjaga komunikasi.

Berikut pemberitaannya terkait dengan judul berita:

**“Kemesraan Jokowi dan Prabowo yang Kian Hari
Terus Menyejukkan.”**

Jakarta - Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terus menunjukkan sikap kenegarawanan. Pertemuan kedua tokoh yang pernah menjadi rival saat Pilpres 2014 itu sangat menyejukkan.

Hubungan harmonis Jokowi dan Prabowo dimulai ketika Jokowi menyambangi mantan Danjen Kopassus itu ke rumahnya di Kebayoran, Jakarta Selatan, usai kemenenangannya di Pilpres 2014. Kunjungan Jokowi pun dibalas Prabowo dengan datang ke Istana Bogor.

Pada akhir bulan Oktober 2016, Jokowi kembali sowan ke Prabowo di rumahnya yang berada di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Bahkan Prabowo saat itu mengajak orang nomor satu di Indonesia tersebut berkuda bersama dan memberinya topi koboi. Meski mantan rival, keduanya berkomitmen untuk terus menjaga NKRI.

"Pernah rival tapi komunikasi baik dan saya kira itu bagus dalam budaya berbangsa. Boleh berbeda pendapat, kadang tajam, tapi di ujungnya kita punya kepentingan sama, NKRI kita ingin menjaga. Saya yakin beliau sebagai patriot ingin terbaik untuk bangsa," ungkap Prabowo saat Jokowi menyambangnya di Hambalang, Senin (31/10).

Pertemuan dimanfaatkan keduanya untuk saling sumbang saran. Prabowo kepada Jokowi juga memberi masukan soal kondisi ekonomi saat ini. Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan NKRI bersama-sama.

"Jangan sampai ada unsur yang mau memecah belah bangsa, itu yang kita jaga," ucap Prabowo.

"Rivalitas itu ada pada saat Pilpres tapi setelah itu kita bahu-membahu membangun negara dari semua sisi, mungkin 2019 ada rivalitas lagi, tapi bahu-membahu lagi," imbuh Jokowi.

Tak berapa lama setelahnya, Prabowo pun langsung membalas kunjungan Jokowi. Ia datang ke Istana Negara dan menyatakan terus berkomitmen untuk membantu Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Saya berkomitmen, sejak 2014 saat mengucapkan selamat. Saya tidak akan menjegal Bapak. Saya pegang komitmen saya," kata Prabowo saat bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (17/11).

Selain itu, bersama Jokowi, Prabowo berkomitmen tetap menjaga kemajemukan Indonesia. Keduanya terlihat akrab dalam kesempatan itu. Jokowi menjamu Prabowo dengan ikan bakar dan es teh untuk santap siang.

"Apabila dibutuhkan, saya siap membantu pemerintah, kapan pun dan di mana pun saya siap. Kita pernah rival tetapi tetap bersahabat. Perbedaan politik hal biasa, tidak boleh jadi perpecahan yang berkelanjutan," jelas dia.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga meminta seluruh tokoh di Indonesia terlibat dalam menjaga suasana tenang. Kepada elemen masyarakat, ia mengingatkan agar tidak mudah terbawa emosi. Kepentingan bangsa menurutnya harus diutamakan.

"Setiap tokoh harus benar-benar menjaga kesejukan, ketenangan, dan tutur kata. Setiap saat saya akan selalu menganjurkan agar kita tidak usah gaduh, gontok-gontokan dan jangan tegang. Selesaikan dengan musyawarah," papar Prabowo.

Sementara itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa saling mengunjungi merupakan tradisi dirinya dengan mantan Pangkostrad tersebut. Ia berharap tradisi yang sama akan diikuti oleh semua kalangan, tak hanya oleh para tokoh negara.

"Saya berharap budaya seperti ini juga sampai ke tengah sampai ke bawah. Saya dan Pak Prabowo berkomitmen jaga Indonesia yang majemuk ini," tutur Jokowi pada kesempatan yang sama.

Jokowi dan Prabowo sepakat untuk menjaga kondisi bangsa tetap kondusif. Persatuan dan kesatuan harus dijaga.

"Kita tidak menginginkan kita terpecah belah gara-gara perbedaan politik. Itu harganya sangat mahal," tegas Jokowi.

Juru bicara Presiden, Johan Budi, mengatakan, pertemuan Jokowi dengan Prabowo menunjukkan bukti nyata bahwa kepentingan negara berada di atas segalanya. Dua mantan rival memiliki sikap *legowo* dan kebesaran hati demi negara.

"Bisa menjadi contoh bagi tokoh-tokoh politik. Ketika di pilpres kompetisi, selesai pilpres mementingkan bangsa bersama. Orang bisa beda politik tapi kepentingan persatuan harus sama komitmennya," sebut Johan Budi saat dihubungi, Kamis (17/11/2016).

Johan mengatakan Jokowi dan Prabowo sempat membicarakan soal kestabilan nasional. Terutama setelah adanya Demo 4 November dan isu akan adanya demo pada 25 November mendatang.

"Tadi seperti yang disampaikan membahas isu-isu kebangsaan, boleh beda pendapat tapi ketika bicara soal persatuan bangsa itu menjadi kepentingan bersama. Harus menyejukkan," tutupnya. (<https://news.detik.com/berita/d-3348187/kemesraan-jokowi-dan-prabowo-yang-kian-hari-terus-menyejukkan>)

Berdasarkan berita tersebut di atas antara Joko Widodo dan Prabowo setelah pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2014 menunjukkan bahwa keduanya bisa saling menjaga hubungan persahabatan walaupun awalnya menjadi rival di ajang pemilihan presiden. Hubungan yang baik tersebut tentunya ditandai oleh adanya komunikasi yang beretika, rasa saling menghargai dan adanya sikap saling mendukung. Perilaku tersebut berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa Indonesia.

Berikut terdapat pesan-pesan yang dikomunikasikan antara Prabowo dan Joko Widodo:

1. "Pernah rival tapi komunikasi baik dan saya kira itu bagus dalam budaya berbangsa. Boleh berbeda pendapat, kadang tajam, tapi di ujungnya kita punya kepentingan sama, NKRI kita ingin menjaga. Saya yakin beliau sebagai patriot ingin terbaik untuk bangsa," ungkap Prabowo saat Jokowi menyambangnya di Hambalang, Senin (31/10).
2. "Rivalitas itu ada pada saat Pilpres tapi setelah itu kita bahu-membahu membangun negara dari semua sisi, mungkin 2019 ada rivalitas lagi, tapi bahu-membahu lagi," imbuh Jokowi.
3. "Apabila dibutuhkan, saya siap membantu pemerintah, kapan pun dan di mana pun saya siap. Kita pernah rival tetapi tetap bersahabat. Perbedaan politik hal biasa, tidak boleh jadi perpecahan yang berkelanjutan," jelas Prabowo.

Kesimpulan

Komunikasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa Indonesia harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya masalah yang dapat menghancurkan masyarakat dan menghilangkan karakter bangsa. Oleh karena itu, untuk mencegah hal demikian, sebagai negarawan Joko Widodo dan Prabowo mampu memberikan contoh yang baik

bagi masyarakat Indonesia. Pada tahun 2014 keduanya pernah menjadi rival dalam pemilihan umum presiden Republik Indonesia yang kemudian dimenangkan oleh Joko Widodo. Namun walaupun mengalami kekalahan, Prabowo tetap menjaga hubungan silaturahmi dengan Joko Widodo. Keduanya sering bertemu dan saling berbagi ide dalam memajukan Indonesia.

Harmonisasi hubungan antara Prabowo dan Joko Widodo tentunya tidak lepas dari adanya komunikasi yang beretika baik secara verbal mau pun non verbal. Ini merupakan bagian dari komunikasi berwawasan kebangsaan karena dalam penyampaian ide, pemikiran dan gagasan mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa Indonesia yang ditandai dengan adanya sikap ramah, jujur, saling mendukung dan beretika.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I, 2001. Penggunaan dan Penyalahgunaan Kebudayaan di Indonesia: Kebijakan Negara dalam Pemecahan Konflik Etnis dalam *Jurnal Antropologi Indonesia No. 66 Tahun XXV*.
- Akhmar, A.M. dan Syarifuddin. (2007). *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*. PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, Kementerian

- Negara Lingkungan Hidup RI dan Masagena Press, Makasar.
- Anderson, Benedict. 1996. *Imagined Communities*. London and New York: Verso, Seventh Impression.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 2002. "Kebudayaan Bali". Dalam Koentjaraningrat (Ed.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Bangun, Pajung. 2002. "Kebudayaan Batak". Dalam Koentjaraningrat (Ed.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Benedict Anderson, *Imagined Community : reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, 1991.
- Cornell, S. & Hartmann, D. (1998). *Ethnicity and Race: Making Identities in a Changing World*. California: Pine Forge Press
- Danandjaja, J. 2002. "Kebudayaan Penduduk Kalimantan Tengah". Dalam Koentjaraningrat (Ed.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Effendi, Onong Uchjana. 2007. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Erikson, Erick, H. 1989. *Identitas dan Siklus Hidup Manusia; Bunga Rampai 1*. Penerjemah : Agus Cremers. Jakarta : PT. Gramedia.
- Harsojo. 2002. "Kebudayaan Sunda". Dalam Koentjaraningrat (Ed.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Herz, F. 1966. *Nationality in History and Politics*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Isajiw, W. (1999). *Definitions and Dimensions of Ehnicity*. Toronto: University of Toronto Press

- Johannesen, Richard L. 1996. *Etika Komunikasi*, Rosda Karya: Bandung
- Junus, Umar. 2002. "Kebudayaan Minangkabau". Dalam Koentjaraningrat (Ed.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Karimah, El Kismiyati dan Uud Wahyudin. 2010. *Filsafat dan Etika Komunikasi*, Bandung: Widya Padjajaran
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). (2016). *Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan*.
- Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN
- Kodiran. 2002. "Kebudayaan Jawa". Dalam Koentjaraningrat (Ed.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Koentjaraningrat (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2002. "Kebudayaan Flores". Dalam Koentjaraningrat (Ed.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- _____. (2005). *Prasangka dan Konflik-Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LkiS
- Mattulada. 2002. "Kebudayaan Bugis-Makassar". Dalam Koentjaraningrat (Ed.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Moekijat*. 1993. *Teori Komunikasi*. Bandung : Mandar Maju.
- Mohammad Hatta; beberapa pokok pikiran*, disunting oleh Sri-Edi Swasono dan Fauzie Ridjal / Sri-Edi Swasono, Fauzie Ridjal.-- Jakarta : UI-Press, 1992.

- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
 “PDSPK” Republik Indonesia tahun 2016
- Rakhmat Jalaludin. 2005. Psikologi Komunikasi. Jakarta :
 PT. Remaja Rosdakarya
- Rumondor, Alex dkk. 1995. *Komunikasi Antarbudaya*.
 Jakarta: Universitas Terbuka
- Schermerhorn. 1996. Management, John Wiley & Sons, New
 Yor. Fifth Edition
- Shafer, Boyd C. 1955. Nationalism Myth and Reality. New
 York: A Harvest Book Harcourt Schermerhorn. 1996.
 Management, John Wiley & Sons, New Yor. Fifth
 Edition
- Sioui, G. (1993). For An Amerindian Autohistory: An Essay
 on the Foundations of a Social Ethic . Montreal:
 McGill-Queen's Press.
- Situmorang, Sodjuangan. 2006. ”Pentingnya Dokumentasi
 Toponimi untuk Mendukung Tata Pemerintahan yang
 Baik”. Makalah dalam The 13th Asia South East &
 Pacific South West Divisional Meeting, 24—25
 August 2006. Jakarta.
- Sjamsuddin, Teuku. 2002. Kebudayaan Aceh”. Dalam
 Koentjaraningrat (Ed.). *Manusia dan Kebudayaan di
 Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Subiyakto. 2002. ”Kebudayaan Ambon”. Dalam
 Koentjaraningrat (Ed.). *Manusia dan Kebudayaan di
 Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sunarso, dkk. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan PKN
 Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Susanto, AB. Manajemen Pemsaran Di Indonesia; Analisis,
 Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian, Edisi
 Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2000

Triwidodo, T. dan Kristianto, Djoko. 2004. Pengembangan Kepribadian Sekretaris. PT Gramedia Indonesia: Jakarta.

<http://bluesand-pampuliina.blogspot.co.id/2013/11/hinaan-farhat-abbas-terhadap-ahmad-dhani.html> (diakses tanggal 15 Oktober 2017, pukul 11.45 WITA)

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/08/21130081/Ini.Kronologi.Perkelahiran.Anggota.DPR.Saat.Rapat.dengan.Menteri.ESDM> (Diakses 15 Oktober 2017, pukul 11.32 WITA)

<http://www.surat kabar.id/49018/news/hina-presiden-jokowi-melalui-akun-facebook-nya-pria-ini-ditangkap-polisi> (diakses tanggal 15 Oktober 2017, pukul 12.02 WITA)

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/nusantaranasional/12/07/30/nasional/daerah/17/10/12/nasional/daerah/17/10/12/nasional/daerah/17/10/12/nasional/daerah/17/10/12/nasional/daerah/17/10/12/nasional/daerah/17/10/12/nasional/daerah/17/10/12/nasional/daerah/17/10/12/nasional/daerah/17/10/12/oxpw6a384-pemkot-palembang-gelar-nikah-massal-35-pasangan-pengantin> (diakses, 15 Oktober 2017, pukul 11.30 WITA)

www.jogjakita.or.id/appetite/sos1.php